



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG

KPKNL
Serang



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Berpedoman pada peraturan tersebut, KPKNL Serang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Laporan capaian kinerja tahun 2023 KPKNL Serang menyajikan hasil pencapaian terhadap 9 (sembilan) Sasaran Strategis *Kemenkeu Three* KPKNL dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023 sebesar 114,77% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada KPKNL Serang.

Serang, 6 Februari 2024

Kepala KPKNL Serang



Ditandatangani secara elektronik
Laila Chairani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Ringkasan Eksekutif	iii	
BAB I	P E N D A H U L U A N	
	A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
	B. Peran Strategis KPKNL Serang	5
	D. Sistematika Laporan	9
BAB II	RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	10
	B. Penetapan Kinerja	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	14
	B. Kualitas Pelaksanaan Anggaran	30
BAB IV	PENUTUP	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pertanggungjawaban KPKNL Serang dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 yang memuat pencapaian sasaran/tujuan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu: “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, KPKNL Serang menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;

10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam perencanaan kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja KPKNL Serang Tahun 2023 terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Seluruh pegawai KPKNL Serang bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan sesuai Nilai - Nilai Kementerian Keuangan.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU yang merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Serang tahun 2023 adalah sebesar 114,77% dengan rincian sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholder Perspective (30%)				
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan			
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	93,00%	120,00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	105,00%	120,00%
1c-N	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
Customer Perspective (20%)				
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	103,49%	103,49%
2b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100,00%	184,70%	120,00%
Internal Process Perspective (25%)				
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			

3a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	68,00%	80,78%	118,79%
3b-CP	Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100,00%	131,90%	120,00%
3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100,00%	110,64%	110,64%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25,00%	0,00%	120,00%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70,00	91,57	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94,00%	97,80%	104,05%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86,00%	98,28%	114,28%
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100,00%	127,84%	120,00%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,00%	94,48%	120,00%
Learning and Growth Perspective (25%)				
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif			
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100,00%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal			
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	95,16	95,16%
8b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100,00%	169,00%	120,00%
8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15,00%	0,00%	120,00%
9	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif			
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60,00	98,69	120,00%
9b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100,00	100,00	100,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				114,77%

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016. Dalam perkembangannya, pada tanggal 28 Oktober 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mencabut kedua Peraturan Menteri Keuangan terdahulu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, wilayah kerja KPKNL Serang meliputi Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Berikut ini adalah peta wilayah kerja KPKNL Serang:

Gambar 1
Peta Wilayah Kerja KPKNL Serang



KPKNL dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon III, dan terdiri dari 5 (lima) seksi/subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

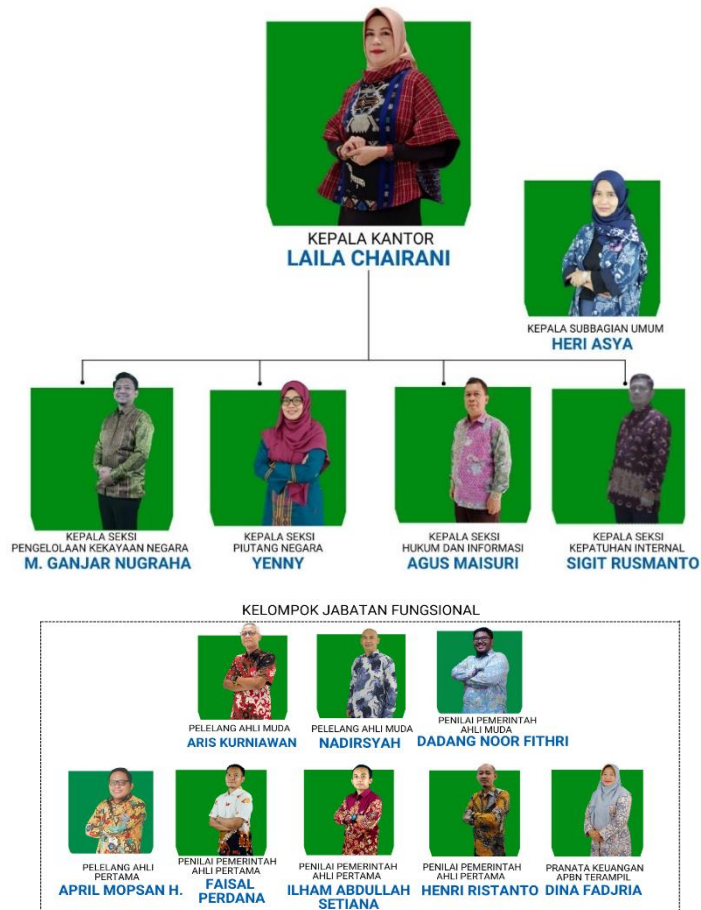
1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Seksi Piutang Negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi;
5. Seksi Kepatuhan Internal; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi pada KPKNL menurut Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 serta struktur organisasi pada KPKNL Serang:

Gambar 2
Struktur Organisasi KPKNL Menurut PMK Nomor 154/PMK.01/2021



Gambar 3
Struktur Organisasi KPKNL Serang per 31 Desember 2023



Pada Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang dilaksanakan oleh 32 (tiga puluh dua) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1
SDM Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Laki – Laki	Perempuan	Total Orang
1.	I	-	-	-
2.	II	4	2	6
3.	III	14	9	23
4.	IV	1	2	3
TOTAL		19	13	32

Tabel 2
SDM Berdasarkan Usia dan Golongan

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30		3			3
31 – 40		2	9		11
41 – 50			10	2	10
Di atas 50		1	5	2	8
Total		6	24	4	32

Tabel 3
SDM Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-
3.	SLTA/DI/DII	-	2	5	-	7
4.	DIII	-	4	-	-	4
5.	DIV/Sarjana	-	-	15	-	15
6.	Pasca Sarjana/Master	-	-	3	3	6
7.	Doktor/S3	-	-	0	0	0
TOTAL						32

Tabel 4
SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
	<i>Struktural:</i>					
1.	Kepala Kantor				1	1
2.	Subbagian Umum		3	6		9
3.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara		1	3		4
4.	Seksi Piutang Negara			2	1	3
5.	Seksi Hukum dan Informasi		1	3		4
6.	Seksi Kepatuhan Internal		1	2		3
	<i>Fungsional:</i>					
1.	Pelelang Ahli Muda			1	1	2
2.	Pelelang Ahli Pertama			1		1
3.	Penilai Pemerintah Ahli Muda			1		1
4.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama			3		3
5.	Pranata keuangan APBN Terampil		1			1
Jumlah						32

B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Serang memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Serang turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya

guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. KPKNL Serang selaku *asset manager* juga mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara berupa PNBPN dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Penilaian

Sebagai bagian dari transformasi yang terjadi pada DJKN, Seksi Pelayanan Penilaian pada akhir tahun 2021 mengalami peleburan menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Penilai Pemerintah Ahli Muda dan Penilai Pemerintah Ahli Pertama. Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan bagian dari proses pengelolaan kekayaan negara. Proses penilaian dilakukan setelah adanya analisis oleh pengelola barang yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dan nilai sewa wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Di sisi lain, nilai pasar dan nilai likuidasi dilakukan terhadap objek penilaian yang merupakan barang jaminan proses pengurusan piutang negara oleh PUPN.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

3. Pengurusan Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab

apapun. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah. Selain itu, juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan BPPN yang permasalahannya sangat kompleks.

Pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Tujuan ditetapkannya peraturan tersebut adalah untuk mendorong terciptanya mekanisme penghapusan Piutang Daerah yang pruden dan akuntabel serta mengatur kembali level of playing field antara PUPN dan Pemda dalam menyelesaikan piutangnya (piutang daerah s.d Rp8 juta akan diselesaikan sendiri oleh Pemda).

4. Pelayanan lelang

Seperti Seksi Pelayanan Penilaian, pada akhir tahun 2021 Seksi Pelayanan Lelang pun bertransformasi menjadi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Pelelang Ahli Muda dan Pelelang Ahli Pertama. Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN.

Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Serang diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam *mindset* masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, DJKN melakukan inovasi dalam pelayanan lelang dengan pelaksanaan lelang melalui internet (e-auction). Sebagai pedoman pelaksanaan e-auction telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023. Sesuai peraturan ini, e-auction dapat digunakan untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, maupun lelang noneksekusi sukarela. Salah satu

keunggulan e-auction adalah pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis, karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung. Lelang e-auction dapat diakses melalui laman lelang.go.id atau dari smartphone berbasis Android melalui aplikasi Lelang Indonesia.

5. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan Barang Milik Negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

Sebagai *supporting unit* Subbagian Umum memegang peranan penting terciptanya pelayanan yang memadai kepada para pengguna jasa. Pada tahun 2023, Subbagian Umum menjalankan pengeluaran operasional rutin dan non operasional untuk pelayanan kepada pengguna jasa melalui seksi teknis. Subbagian Umum juga melakukan manajemen SDM pada KPKNL Serang dengan melakukan pemetaan SDM dan menempatkannya sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, Subbagian Umum juga melakukan penatausahaan atas BMN yang tercatat dalam daftar barang KPKNL Serang.

6. Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

7. Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dimaksud, selama tahun 2023 KPKNL Serang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Serang di tahun yang akan datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis.

Dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Serang mempunyai visi: “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL Serang mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Serang sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2021-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Pada dasarnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Adapun sasaran yang hendak dicapai KPKNL Serang untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

2. Produktivitas Lelang
3. Indeks Integritas
4. Realisasi Pokok Lelang
5. Penurunan Outstanding Piutang Negara
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
7. Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan
8. Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
9. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
10. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
11. Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
12. Pelaksanaan Permohonan Lelang Online
13. Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
14. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
15. Pengembangan kompetensi pegawai
16. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
17. Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
18. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN
19. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
20. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM

B. PENETAPAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Kontrak Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Kontrak Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dilengkapi dengan rumusan indikator kinerja serta target kinerjanya.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja interim dan tahunan. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini KPKNL Serang.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Serang harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. *Balance Score Card* (BSC) merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Dalam hal ini, peta strategi Kemenkeu Three KPKNL Serang tahun 2023 mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Ketiga perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dengan peta strategis sebagai berikut:

Gambar 4
Peta Strategi KPKNL Serang



Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Serang telah membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Serang tahun 2023 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2023 terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 5
Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategi Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective (30%)		
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%
1c-CP	Indeks Integritas	88,67
Customer Perspective (20%)		
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%
2b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100,00%
Internal Process Perspective (25%)		
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	
3a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	68,00%
3b-CP	Persentase bidang tanah yang disertipatkan	100,00%
3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100,00%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25,00%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94,00%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86,00%
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100,00%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,00%
Learning and Growth Perspective (25%)		
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
8b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100,00%
8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15,00%
9	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif	
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
9b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023 terhadap 20 (dua puluh) IKU KPKNL Serang Tahun 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja \geq 100% (indikator warna hijau)
- 1 (satu) IKU memperoleh hasil capaian kurang $<$ 100% s.d.80% (indikator warna kuning)

Adapun rincian tabel terhadap capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Capaian Kinerja Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholder Perspective (30%)				
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan			
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	93,00%	120,00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	105,00%	120,00%
1c-N	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
Customer Perspective (20%)				
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	103,49%	103,49%
2b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100,00%	184,70%	120,00%
Internal Process Perspective (25%)				
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
3a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	68,00%	80,78%	118,79%
3b-CP	Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100,00%	131,90%	120,00%

3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100,00%	110,64%	110,64%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25,00%	0,00%	120,00%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70,00	91,57	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94,00%	97,80%	104,05%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86,00%	98,28%	114,28%
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100,00%	127,84%	120,00%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,00%	94,48%	120,00%
Learning and Growth Perspective (25%)				
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif			
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100,00%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal			
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	95,16	95,16%
8b-CP	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100,00%	169,00%	120,00%
8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15,00%	0,00%	120,00%
9	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif			
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60,00	98,69	120,00%
9b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100,00	100,00	100,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				114,77%

Berikut ini adalah uraian analisis dan evaluasi kinerja terhadap 9 (sembilan) Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Serang Tahun 2023 untuk setiap Indikator Kinerja Utama:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

a. Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang (1a-CP)

Tabel 7

Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Nama IKU : Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	22,92%	38,76%	38,76%	92,64%	92,64%	140,55%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target nilai penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara tahun 2023 sebesar Rp13.553.584.000,00 dengan rincian target PNBPN pengelolaan BMN Rp6.565.284.000,00, target PNBPN Piutang Negara Rp3.500.000,00, dan target PNBPN lelang Rp6.984.800.000,00.

Adapun realisasi nilai penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp19.050.099.543,00 yang terdiri atas realisasi PNBPN pengelolaan BMN Rp12.083.158.621,00 (184,05%), realisasi PNBPN Piutang Negara Rp487.382.317,00 (13925,21%), dan realisasi PNBPN lelang Rp6.479.558.605,00 (92,77%) Total realisasi IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah 140,55%

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, diantaranya adalah:

1. Debitur tidak memiliki kemampuan membayar, tidak mengakui utangnya, dan barang jaminan tidak dikuasai / tidak diserahkan kepada KPKNL
2. Terdapat wilayah di Provinsi Banten yang masyarakatnya memiliki budaya sungkan membeli objek lelang milik tetangga

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi KPKNL Serang telah berupaya melaksanakan tindakan untuk mencapai PNBPN yang sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyampaian Surat Paksa ke Debitur
2. Sosialisasi dan Penagihan langsung ke debitur

3. Membuat nota dinas secara rutin bulanan ke KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung, surat secara triwulanan kepada BLU Untirta dan UIN SMH, dan melakukan rekapitulasi PNBPN dari data SLDK maupun Simponi setiap dua minggu.
4. Pelaksanaan Sosialisasi ke BPKAD Provinsi Banten
5. Koordinasi ke Pemohon lelang agar pengajuan lelang di Q4 adalah yang telah memiliki potential buyer

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah:

1. Penyampaian Surat Paksa ke Debitur
2. Sosialisasi dan Penagihan langsung ke debitur
3. Membuat nota dinas secara rutin bulanan ke KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung, surat secara triwulanan kepada BLU Untirta dan UINSMH, dan melakukan rekapitulasi PNBPN dari data SLDK maupun Simponi
4. Melaksanakan penggalan potensi di asset BPJS Kesehatan Pusat melalui koordinasi

b. Presentase Produktivitas Lelang (1b-CP)

Tabel 8
Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Nama IKU : Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	58,80%	80,50%	80,50%	105,23%	105,23%	122,77%	122,77%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target persentase produktivitas lelang pada tahun 2023 adalah sebesar 80%. Adapun Lot lelang sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 pada KPKNL Serang yaitu Frekuensi Lot laku lelang Non Eksekusi Sukarela sebanyak 149 dengan Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela sebanyak 199, Frekuensi Lot laku lelang Non Eksekusi Wajib sebanyak 224 dengan Jumlah Frekuensi Lelang Laku Wajib 297, Frekuensi Lot laku lelang Eksekusi HT sebanyak 69 dengan jumlah Frekuensi Lelang HT sebanyak 815, Frekuensi laku lelang Eksekusi selain HT sebanyak 36 dengan Jumlah Frekuensi Lelang selain HT sebanyak 80.

Akar permasalahan yang menyebabkan pencapaian produktivitas lelang tidak sesuai target yang diharapkan adalah barang tidak bergerak cenderung tidak likuid tidak seperti barang bergerak yang dimudah dijual kembali dan sebagian besar lelang merupakan

lelang eksekusi sehingga menurunkan minat calon pembeli. Sementara tindakan yang telah dilakukan KPKNL Serang guna pencapaian target adalah melakukan FGD ke Bank Himbara (BNI, BTN, Mandiri, BRI) untuk penggalan potensi lelang. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target produktivitas lelang adalah Melaksanakan penggalan potensi di asset BPJS Kesehatan Pusat melalui koordinasi.

c. Indeks Integritas (1c-N)

Tabel 8
Capaian IKU Indeks Integritas

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Nama IKU : indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	-	-	-	-	-	88,67%	88,67%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17%	89,17%	
Capaian	-	-	-	-	-	100,56%	100,56%	

Target IKU Indeks Integritas pada tahun 2023 sebesar 88,67. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Realisasi dari IKU ini berdasarkan penilaian dari UKI tingkat I atau Sekretariat DJKN yaitu sebesar 89,1%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang (2a-CP)

Tabel 9
Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Nama IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	22,14%	31,04%	31,04%	47,03%	47,03%	103,49%	103,49%	
Capaian	120%	77,59%	77,59%	67,20%	67,20%	120%	120%	

Target hasil lelang pada KPKNL Serang tahun 2023 sebesar Rp180.100.000,00 yang terbagi menjadi pokok lelang PL Kelas I sebesar Rp159.100.000.000,00 dan pokok lelang pegadaian sebesar Rp21.000.000.000,00. Adapun realisasi pokok lelang pada

tahun 2023 adalah sebesar Rp186.380.131.350,00 atau sebesar 103,49% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian pokok lelang PL Kelas I sebesar Rp140.806.266.750,00 dan pokok lelang Pegadaian sebesar Rp45.573.864.600,00.

Akar masalah dalam pencapaian target pokok lelang pada tahun 2023 adalah pemasaran yang dilakukan oleh penjual dan balai lelang belum maksimal dan belum diajukannya permohonan lelang ulang yang berpotensi laku oleh penjual. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, KPKNL Serang telah melaksanakan langkah-langkah dengan Pelaksanaan Sosialisasi ke BPKAD Provinsi Banten koordinasi ke Pemohon lelang agar pengajuan lelang di Q4 adalah yang telah memiliki potential buyer.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Serang untuk mencapai pokok lelang sesuai yang optimal adalah Melaksanakan penggalan potensi di asset BPJS Kesehatan Pusat melalui koordinasi.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (2b-CP)

Tabel 10

Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Nama IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	39,79%	74,68%	74,68%	95,41%	95,41%	184,70%	184,70%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target *outstanding* piutang negara yang harus diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.345.117,000,00 dan realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp7.757.461.347,00 (184,70%). Dengan demikian IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai capaian 120%.

Dalam pencapaian target IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara terdapat permasalahan yang terjadi yaitu sebagian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tidak dilengkapi dokumen pendukung seperti KTP dan Perjanjian Kredit yang menyebabkan debitur tidak mengakui adanya kewajiban yang harus diselesaikan.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai penurunan *outstanding* yang maksimal, adalah:

1. Penyampaian Surat Paksa ke debitur
2. Sosialisasi dan penagihan langsung ke debitur

Adapun rencana aksi yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang khususnya Seksi Piutang Negara adalah pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang Tahun 2023, sosialisasi dan penagihan langsung

3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK (3a-CP)

Tabel 12

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Nama IKU : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%	Max/TLK
Realisasi	-	75,76%	75,76%	88,64%	88,64%	80,78%	80,78%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	118,79%	118,79%	

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Target tahun 2023 adalah 68,00% dengan realisasi sebesar 80,78%.

Dalam mencapai target IKU ini ada permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu satuan kerja belum mendapat sosialisasi terkait pengisian SBSK. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Melakukan pendataan dan perhitungan pada BBWS, Kejati Banten, PJI I Banten, Polres Cilegon, dan SPN Polda Banten. Sementara rencana aksi yang akan dilakukan adalah: Melakukan verifikasi dan validasi target pendataan dan pengukuran SBSK 2024 dan penyampaian surat kepada Satuan Kerja.

b. Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan (3b-CP)

Tabel 13

Capaian IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Nama IKU : Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	14,25%	14,25%	56%	56%	131,90%	131,90%	
Capaian	-	35,36%	35,36%	92,76%	92,76%	120%	120%	

Target bidang tanah yang disertifikatkan Tahun 2023 pada KPKNL Serang sebanyak 442 NUP. Jumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan s.d. Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 583 bidang tanah.

Dalam upaya pencapaian target sertifikasi BMN berupa tanah ada beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Serang, di antaranya adalah:

1. Sebagian satuan kerja kesulitan mendapatkan bukti pelepasan hak, mengingat BMN yang disertifikatkan merupakan BMN perolehan lama sehingga dokumen pendukungnya tidak lengkap.
2. Satuan kerja tidak mengetahui batas-batas bidang tanahnya.
3. Operator BMN satuan kerja yang mengalami perubahan personil sehingga tidak mengetahui data histori dari tanah yang akan disertifikatkan.

Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut: Melakukan koordinasi secara langsung atau surat dengan Satker, Kantor Pertanahan, dan Kanwil DJKN Banten untuk penyelesaian Sertifikasi BMN tahun 2023. Sementara rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai target sertifikasi BMN berupa tanah adalah melakukan verifikasi target sertifikasi BMN Tahun 2023 dan melaksanakan rapat pembahasan dalam rangka persiapan sertifikasi BMN Tahun 2023.

c. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP (3c-CP)

Tabel 14
Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Nama IKU : Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	12,77%	38,30%	38,30%	63,83%	63,83%	110,64%	110,64%	
Capaian	120%	120%	120%	106,38%	106,38%	110,64%	110,64%	

Target penyelesaian BKP tahun 2023 adalah sebanyak 47 BKP. Jumlah BKP yang diselesaikan s.d. triwulan IV tahun 2023 sebanyak 52 BKP. Dalam mencapai target tersebut KPKNL Serang juga mengalami permasalahan seperti sebagian piutang negara tidak dilengkapi dokumen seperti KTP dan Perjanjian Kredit yang menyebabkan debitur tidak mengakui adanya kewajiban yang harus diselesaikan.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Serang untuk menyelesaikan BKP adalah melaksanakan penelitian lapangan agar debitur menyelesaikan kewajibannya dan

menyelesaikan PSBDT atas nama Kelompok Tani Karya Bhakti / Amin dan Duljakar / Kelompok Tani Hegarmanah VI. Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu melakukan PSBDT atas nama Kelompok Tani Karya Bhakti / Amin

4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (4a-CP)

Tabel 16
Capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Nama IKU : Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian s.d. Triwulan IV adalah sebesar 0%. Beberapa kendala dalam pencapaian target IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah:

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemanfaatan memberikan harga taksiran yang tinggi/di atas nilai wajar.
2. Pengelola Barang memberikan persetujuan dengan memberikan nilai yang lebih menguntungkan bagi negara agar terhindar dari temuan auditor meskipun nilai tersebut di atas nilai wajar.
3. Tim penilai bersifat independen dan hasil penilaian merupakan nilai wajar yang tidak terpengaruh pada nilai taksiran yang diajukan pada permohonan.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah meningkatkan koordinasi dengan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara agar dapat menyesuaikan dengan nilai wajar. Sementara rencana aksi yang akan dilakukan yaitu koordinasi awal dengan Pengelola Barang terkait rencana permohonan penilaian BMN.

b. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien (4b-CP)

Tabel 17

Capaian IKU Rata – Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Nama IKU : Rata-Rata Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/TLK
Realisasi	94,80	93,07	93,07	91,20	93,02	91,57	91,57	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien s.d. Triwulan IV adalah sebesar 91,57% .

Tindakan yang Telah dilaksanakan

1. Melaksanakan penilaian sesuai prosedur dan SOP
2. Menjalankan inovasi percepatan SOP

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melaksanakan penilaian sesuai prosedur dan SOP
2. Menjalankan inovasi percepatan SOP

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. Persentase Pelaksanaan *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* (5a-CP)

Tabel 17

Capaian IKU Persentase Pelaksanaan *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Nama IKU : Persentase Pelaksanaan e-auction dan e-conventional auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Max/TLK
Realisasi	100%	99,73%	99,73%	98,35%	98,35%	97,80%	97,80%	
Capaian	106,38%	106,09%	106,09%	104,63%	104,63%	104,05%	104,05%	

Jumlah pelaksanaan lelang e-auction pada KPKNL Serang triwulan IV 2023 sudah seluruhnya dilaksanakan secara e-auction atau 97,80% dengan jumlah Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction sebanyak 757 frekuensi dari total frekuensi sebanyak 774 frekuensi.

Hasil capaian tersebut terjadi karena pada lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang, pemohon lelang sudah melakukan permohonan secara online dan dengan adanya e-auction objek lelang lebih mudah terjual. Kemudian dalam upaya pencapaian target, KPKNL Serang melaksanakan lelang seluruhnya dengan e-auction serta memberikan sosialisasi terhadap stakeholder (baik itu pemohon lelang maupun calon peserta lelang)

terkait lelang e-auction. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan lelang seluruhnya dengan e-auction.

b. Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online (5b-CP)

Tabel 18
Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Nama IKU : Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%	Max/TLK
Realisasi	99%	98,37%	98,37%	97,92	98,37%	98,28%	98,28%	
Capaian	115,12%	114,39%	114,39%	113,86%	113,86%	114,28%	114,28%	

IKU deviasi data PNBP fungsional DJKN merupakan IKU yang membandingkan dan mengukur akurasi data PNBP fungsional DJKN berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang. Untuk biaya administrasi pengurusan piutang negara data yang dibandingkan adalah data pada aplikasi Focus PN dengan data pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Sementara untuk bea lelang data yang dibandingkan adalah data pada aplikasi dropbox lelang dan aplikasi OM SPAN. Target deviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2022 sebesar 10%. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 0%. Dengan demikian IKU deviasi data PNBP fungsional DJKN tercapai dengan nilai 120%.

Tindakan yang telah dilakukan oleh KPKNL Serang dalam menjaga agar deviasi data PNBP tetap dibawah batas yang ditetapkan adalah melaksanakan koordinasi antar seksi yang berkaitan dengan PNBP fungsional yaitu, Subbagian Umum, Seksi Piutang Negara, dan Seksi Hukum dan Informasi. Sementara rencana aksi yang akan dilakukan adalah tetap melakukan koordinasi antar seksi agar deviasi data tidak besar.

c. Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5c-CP)

Tabel 18
Capaian IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Nama IKU : Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	19,16%	33,10%	33,10%	95,14%	95,14%	127,84%	127,84%	
Capaian	120%	103,43%	103,43%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi jumlah NUP yang telah selesai di evaluasi s.d. Triwulan IV sebanyak 56 NUP dan jumlah rekomendasi yang disusun s.d. Triwulan IV sebanyak 10 NUP

Dalam upaya pencapaian target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) kendala utama yang dihadapi adalah satuan kerja belum mendapat sosialisasi terkait pengisian portofolio aset pada aplikasi SIMAN. Adapun tindakan yang telah dilakukan KPKNL Serang dalam mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi data portofolio aset pada beberapa satker dalam wilayah kerja KPKNL Serang. Rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Serang dalam mencapai target adalah Melakukan verifikasi dan validasi target Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) dan penyampaian surat kepada Satuan Kerja

6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

a. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara (6a-CP)

Tabel 19
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Nama IKU : Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	-	50,00%	50,00%	-	-	86,00%	86,00%	Max/TLK
Realisasi	-	75,76%	75,76%	90,91%	94,31%	98,48%	98,48%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target IKU Persentase Tindak lanjut pengelolaan aset pada tahun 2023 sebesar 86%, dengan target trajectory IKU pada Triwulan IV sebesar 86%. Dengan Jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN sebanyak 65 dan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II 2022 s.d. semester I 2023 sebanyak 66.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target adalah Rendahnya tingkat kesadaran satuan kerja untuk melaporkan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN yang telah dikeluarkan KPKNL

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah melaksanakan sosialisasi untuk menyampaikan peraturan atau kebijakan terbaru. Dalam upaya mempertahankan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi, KPKNL Serang memiliki rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan pejabat/pegawai pada seksi teknis melalui pendidikan dan latihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (7a-CP)

Tabel 20

Capaian IKU Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Nama IKU : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2023 sebesar 120%. Pemenuhan kriteria apabila pegawai memenuhi Jam Pelatihan dengan jenis pengembangan kompetensi mengacu pada PMK 216/2018. Permasalahan yang dihadapi KPKNL Serang dalam pencapaian target adalah rendahnya tingkat kesadaran satuan kerja untuk melaporkan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN yang telah dikeluarkan KPKNL. Dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi KPKNL Serang melakukan Menyusun Nota Dinas usulan diklat tiap bulan, Meminta atasan langsung pegawai untuk mendukung bawahan agar mengusulkan diklat, Berkonsultasi dengan Kepala Kantor terkait persetujuan diklat pegawai

Sementara itu rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Serang adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan ke satuan kerja.

8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (8a-CP)

Tabel 21

Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Nama IKU : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	97,41	93,07	93,07	91,14	91,14	91,75	91,75	
Capaian	97,41%	97,46%	97,46%	91,14%	91,14%	95,16%	95,16%	

Target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 92,42% atau sebesar 95,16% dari target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dialami oleh KPKNL Serang dalam mencapai target adalah Kendala yang dihadapi Keterlambatan realisasi belanja modal, berupa proyek renovasi Gudang dan Gedung. Sementara tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian target adalah Berkoordinasi dengan seksi teknis terkait capaian output. Tindakan yang telah diupayakan oleh KPKNL Serang dalam mencapai target adalah melakukan koordinasi dengan semua seksi mengenai Rencana Kerja dan Penarikan Dana setiap Triwulan. Adapun rencana aksi yang dilakukan oleh KPKNL Serang adalah meningkatkan koordinasi dengan semua seksi mengenai rencana kerja dan penarikan dana setiap triwulan, mengidentifikasi mata anggaran yang bisa dilakukan penghematan, dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran setiap bulan.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (8b-CP)

Tabel 22

Capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Nama IKU : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ KP
Target	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	169,00%	169,00%	
Capaian	-	-	-	-	-	120,00%	120,00%	

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan completeness master asset. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan. Target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2023 sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi KPKNL Serang dalam pemenuhan target yaitu Kantor Pusat DJKN baru menyampaikan Manual IKU yang bisa dipergunakan oleh unit kantor vertikal pada Q4 sehingga capaian pada Q1 s.d. Q3 sebelumnya tidak bisa dihitung. Adapun tindakan yang telah dilakukan yaitu melakukan perhitungan disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

c. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (8c-CP)

Tabel 23
Capaian IKU Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Nama IKU : Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Po/ K P
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Max/TLK
Realisasi	0%	6,67%	6,67%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target deviasi data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2023 sebesar 15%

Realisasi deviasi data PNBP Fungsional DJKN s.d. Triwulan IV adalah sebesar 0%

Akar masalah yang terjadi adalah Adanya setoran dari debitur pada akhir tahun anggaran dan baru disetorkan ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya

Tindakan yang dilaksanakan untuk mencegah permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi antar seksi (Subbagian Umum, Seksi Hukum dan Informasi, dan Seksi Piutang Negara).

9. Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif

a. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif (9a-N)

Tabel 24
Capaian IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif							
	Nama IKU : Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	-	-	-	-	-	60%	60%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	98,69%	98,69%	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Target IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif pada tahun 2023 sebesar 60. Nilai dari IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif didapat dari perangkat penilaian berupa Kertas Kerja Penilaian Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang berisi Komponen Pengungkit berupa Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) dan Pemantauan-Pemantauan lainnya dan Komponen Hasil berupa Jumlah Pengaduan, OTT, IKPL dan SPI. Realisasi dari IKU ini berdasarkan penilaian dari UKI tingkat II atau Kanwil DJKN Banten adalah 98,69%.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Serang dalam mencapai nilai yang ditargetkan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin per bulan dan melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut money selama satu tahun dari awal mulai penilaian sampai akhir pengumuman hasil.

b. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM (9b-N)

Tabel 25
Capaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>							
	Nama IKU : Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	-	-	-	-	-	100%	100%	

Target IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM pada tahun 2023 sebesar 100. Adapun tindakan serta rencana aksi yang dilakukan untuk memenuhi pencapaian target adalah Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin per bulan dan melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut money selama satu tahun dari awal mulai penilaian sampai akhir pengumuman hasil.

B. KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 yaitu berdasarkan SE-8/MK.1/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas perhitungan nilai IKPA dan nilai SMART DJA. Nilai IKPA terdiri atas 13 (tiga belas) komponen yang terdiri dari Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Kinerja Capaian Output, Rekonsiliasi LPJ, Perencanaan Kas, Realisasi Anggaran, Pagu Minus, dan Dispensasi SPM. Perhitungan capaian kinerja yang terbagi dalam nilai IKPA dan nilai SMART DJA tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 26
Capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Serang
Tahun Anggaran 2023

Indikator		Nilai ^{*)}	Bobot	Nilai Akhir
Revisi DIPA		100,00	10	10,00
Deviasi Hal III DIPA		93,03	10	9,30
Penyerapan Anggaran		94,61	20	18,92
Belanja Kontraktual				
Penyelesaian Tagihan				
Pengelolaan UP dan TUP		100,00	10	10,00
Dispensasi SPM		100,00	5	5,00
Capaian Output		100,00	25	25,00
Total		587,64	80	78,23
Capaian IKPA				97,78
Indikator		Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Capaian Rincian Output	100,00	43,50%	43,50
2	Efisiensi	62,77	28,60%	17,95
3	Konsistensi RPD	98,90	18,20%	18,00
4	Penyerapan Anggaran	96,80	9,70%	9,39
Capaian SMART				88,84
Capaian Tahun 2023				92,42

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Serang tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPKNL Serang tahun 2023 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPKNL Serang ada yang berhasil melampaui target, namun ada pula yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Serang, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis yang mencapai target, dan 1 (satu) Sasaran Strategis yang belum dapat memenuhi target yang ditentukan.

Terhadap 1 (satu) Sasaran Strategis yang realisasinya belum tercapai 100%, yaitu untuk Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal akan dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan agar pada tahun yang akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan.